

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Tahun 2019, Masyarakat Dunia di gemparkan dengan adanya wabah yang disebut dalam istilah kedokteran sebagai 2019 novel coronavirus yang menyerang imun manusia dengan cepat. Masyarakat dunia menjadi prihatin dengan virus corona, yang merupakan virus baru yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan hingga saat ini belum ada obatnya. Negara-negara lain sudah mulai menyusun kebijakan, program, dan strategi dalam rangka memutus mata rantai virus corona (covid-19) dan mencegahnya menyerang negaranya.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Indonesia sebagai negara yang terpapar virus corona (covid-19). Menurut pakar epidemiologi universitas Indonesia, kasus pertama virus corona ini di Indonesia sudah merupakan transmisi lokal, karena pemerintah Indonesia tidak lantas menutup akses penerbangan ke wuhan, maka dari itu masuknya virus diduga dari gerbang – gerbang wilayah Indonesia. Data Kasus covid-19 sejak diumumkan tanggal 2 maret 2020 – 31 maret 2020 mencapai 3.500 kasus covid-19 di Indonesia. (Pandu Riono pakar epidemiologi, 2020). Dengan kondisi yang semakin darurat akibat virus corona (covid-19) ini pemerintah Indonesia telah menetapkan virus corona (covid-19) sebagai bencana nasional

melalui keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang kebijakan non-alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional (Samudro & Madjid, 2020). Sebelumnya presiden juga mengeluarkan sejumlah peraturan dan kebijakan, diantaranya Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial skala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus Disease 2019 (covid-19), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

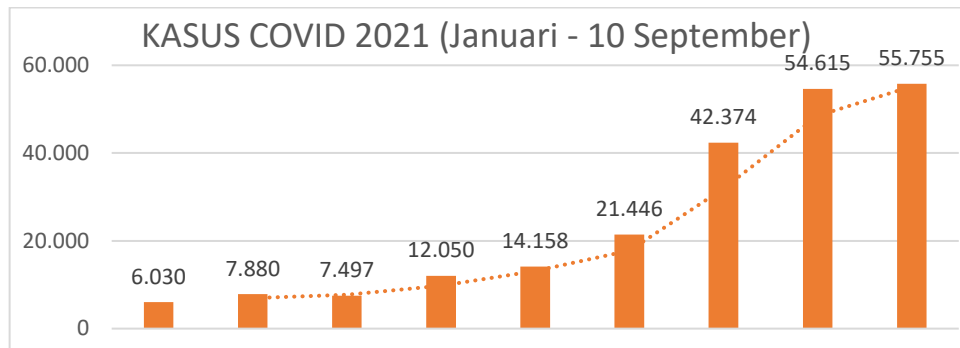
Pemerintah harus memberlakukan sejumlah aturan dan regulasi di atas dalam rangka menghadapi wabah virus corona di tahun 2020 (covid-19). Ini juga berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan tugas bagi masyarakat lokal di wilayah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan oleh beberapa daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menginisiasi kebijakan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) dengan menerapkan kebijakan “karantina wilayah” atau “local lock” secara mandiri sebelum adanya kebijakan yang tegas dan jelas dalam menangani dengan Covid-19 juga diperlukan. (Suherman, 2020). Pemerintah Daerah Yogyakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 yang menjabarkan metodologi operasional gugus tugas dalam penanganan virus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup operasi diatur dalam peraturan gubernur ini dalam hal strategi operasional, rencana aksi, pendanaan, dan tanggung jawab. Ketua Tim Satgas

Covid-19 bertugas menentukan rencana operasi. Selain itu, rencana aksi dibuat berdasarkan rencana operasional yang ditetapkan oleh pimpinan satgas. APBN, APBD, dan sumber keuangan lain yang sah memberikan pembiayaan untuk penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi DIY dalam tanggap bencana covid juga memberikan fasilitas shalter untuk penampungan masa karantina yang terinfeksi Virus Covid-19, dan juga memberikan Layanan Siaga covid-19 dengan menghubungi nomor, aktif 24 jam.

Dengan Hal ini Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mengeluarkan Peraturan yang harus diterapkan dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan desa. Selain itu peraturan ini juga harus diterapkan di tempat-tempat fasilitas umum maupun lingkungan masyarakat. Data Kenaikan Kasus yang terkonfirmasi Covid di DIY per tanggal 5 September 2021 kumulasi 169.324 diantaranya, kabupaten sleman 53.175, kabupaten gunungkidul 17.465, kabupaten kulonprogo 21.995, kabupaten sleman 55.371, kota Jogja 21.318. pada tanggal 6 september 2021 tambah sejumlah 198, diantaranya kabupaten Sleman 59, kabupaten gunung kidul 20, kabupaten kulonprogo 17, kabupaten Bantul 85, dan kota jogja 17. (Dinas Kesehatan DIY, 2021). Dengan adanya Data diatas menunjukkan bahwa kabupaten Bantul adalah wilayah yang tinggi angka kasus covid-19. Bupati kabupaten Bantul mengeluarkan intruksi No. 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), dan Pemerintah Bantul juga membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Diasease 2019 (COVID-19) Nomor. 135 Tahun 2020. Tujuan di bentuknya Satgas Covid-19

Bantul yaitu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan covid-19, dan juga melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Adanya satgas Covid-19 di Kabupaten Bantul hingga tingkat kapanewon lebih mudah dalam mengendalikan kasus covid-19 di Bantul. Akan tetapi Realitanya kasus covid-19 di Kabupaten Bantul terus melonjak, hal ini akan menimbulkan korban jiwa dan dampak di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, sehingga perlu diantisipasi dampaknya. Adapun tindakan preventif yang sudah dilakukan Satgas Bantul yaitu penyemprotan di tempat umum dan konsultasi di semua puskesmas Kabupaten Bantul. Pemerintah kabupaten Bantul juga menambah selter yang diawasi oleh satgas Bantul. Para satgas Bantul juga akan mengevaluasi, sampai pada bentuk keterlibatan masyarakat. Untuk mengedepankan unsur gotong royong dalam mencukupi akomodasi terhadap pasien yang dirawat selter. Tidak hanya itu, satgas Bantul juga melakukan pengawasan dilakukan guna memastikan selter berfungsi maksimal, istilahnya dalam perorganisasian satgas, sebisa mungkin dilakukan sengkuyung kewilayahan akan lebih baik. Berikut Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul :

Gambar 1.1. Kenaikan Kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul



Sumber : Laporan Dinas Kesehatan Bantul Tahun 2021.

Berdasarkan Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul Tahun 2021 sejak Januari hingga September terus mengalami peningkatan, dimana pada bulan Januari 6.030 kasus hingga bulan September terlihat ada peningkatan 55.755 kasus covid-19 di Bantul. Dengan adanya peningkatan ini tentu jika dikaitkan dengan peran satgas covid-19 menjadi sesuatu hal yang tidak efektif, karena dengan keberadaan satgas covid-19 sejak 2020 hingga 2021, tetap meningkat angka kasus covid-19 di Bantul. Sedangkan yang diharapkan dengan adanya satgas covid-19 di Kabupaten Bantul ini dapat menurunkan angka kenaikan kasus covid-19. sehingga menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menemukan sebuah masalah yaitu :

Apakah Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Satgas Covid Disease dalam penanggulangan covid-19 di Kabupaten Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Faktor Apa yang Mempengaruhi efektivitas satgas disease covid-19 di Kabupaten Bantul dalam penanggulangan covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini secara teori diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan wawasan mengenai Faktor Efektivitas yang dilakukan satgas covid-19 kabupaten Bantul dalam penanggulangan covid-19.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan Adanya penelitian ini secara praktis dapat mengetahui dengan adanya Satgas Covid-19 di Kabupaten Bantul ini Faktor yang mempengaruhi efektif dalam penanggulangan covid-19, dan serta dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi Satgas covid-19 di Kabupaten Bantul.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penjelasan beberapa tinjauan Pustaka yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan Pustaka memiliki pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang penelitian ini untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lain. Berikut tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini :

Jurnal yang ditulis oleh (Prasetia et al., 2020) Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan ancaman kemanusiaan dan telah ditetapkan sebagai pandemi kesehatan global oleh World Health Organization (WHO). Provisni Bali sebagai salah satu wilayah yang terdampak signifikan terhadap wabah tersebut telah merespon dengan membentuk berbagai lini Satuan Tugas salah satunya Satuan Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat, dan Jurnal yang ditulis oleh (Ary et al., 2020) Covid-19 merupakan pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu bentuk kekhawatiran masyarakat. Saat ditetapkannya status pandemi Covid-19, berbagai negara melakukan upaya pencegahan penularan penyakit tersebut. tidak terkecuali Indonesia. Salah satu cara untuk memutus rantai penularan adalah dengan melakukan disinfeksi. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan efektivitas dari penggunaan gerbang desinfektan untuk mencegah penularan Covid-19 di masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh (Sari, Puspita & Sholibah, Mar'atu, 2021) Peningkatan kasus Covid-19 mengalami peningkatan di Jawa Tengah dan berdampak pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan pariwisata. Kabupaten Sukoharjo mengalami kejadian peningkatan kasus Covid-19

khususnya di Kecamatan Mojolaban. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jogo Tonggo. Program Jogo Tonggo sebagai konsep *community empowerment* yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membentuk kesadaran bersama, ketaatan masyarakat Jawa Tengah pada imbauan negara, serta solidaritas sosial di antara warga masyarakat. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan survey pendahuluan, kemudian data primer berupa Hasil indept interview mengenai implementasi program Jogo Tonggo. Teknik sampling menggunakan tehnik Purposive Sampling sedangkan metode analisis data menggunakan tehnik reduction, data display dan conclusion drawing/verification, sedangkan untuk mempermudah keakuratan sebuah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan tehnik Triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan Program Jogo Tonggo terkesan terlambat dalam upaya penanganan Covid-19 karena sebelumnya telah ada dibentuk Satgas Covid-19.

Jurnal yang ditulis oleh (Ninla Elmawati Falabiba et al., 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kepemimpinan profetik dalam menangani krisis Covid-19 yang berdampak pada semua bidang kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

studi kasus. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan bantuan alat perekam suara Adapun bentuk pedoman wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah semi terstruktur. Jumlah subyek yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah tiga subjek dengan satu significant others. Hasil penelitian ini diperoleh melalui interpretasi analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan profetik efektif dalam menangani krisis pandemi dengan aspek Fathonah sebagai puncak dari ketiga aspek lain yaitu sidiq, amana dan tabliq. Dari penelitian ini kepemimpinan profetik Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta efektif dalam menekan angka sebaran Covid-19 sampai dengan bulan Agustus. Pada bulan September, beberapa keputusan pemerintah pusat membuat Satgas Penanganan Covid-19 tidak bisa menerapkan kepemimpinan profetik.

Jurnal yang ditulis oleh (Sumandiyar et al., 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor Terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan model pendekatan multisistemik yang digunakan untuk memberikangambaran umum tentang strategi yang digunakan Satuan Tugas Covid-19 untuk menangani penyebaran Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik modal sosial yang dimiliki pada Satuan Tugas Covid-19 dalam penanganan PPKM Darurat dengan

menggunakan pendekatan multiaktor. Pendekatan ini diharapkan memberikan solusi yang komprehensif untuk menganalisis berbagai macam bentuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh (Puspawati et al., 2020) Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di tahun 2020 menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. COVID-19 ini disebabkan oleh virus Sars-Cov2 dengan penyebaran yang cepat dari manusia ke manusia melalui droplet. Virus ini menyebabkan gangguan pernapasan akut dengan masa inkubasi hingga 14 hari. Jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia, khususnya Bali terus mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sinergi pemerintah berbasis adat di Bali dilakukan dengan melibatkan pecalang sebagai penegak hukum adat di Desa Pakraman. Pecalang sebagai organisasi adat dilibatkan sebagai Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1571 Tahun 2020. Tugas Satgas Gotong Royong ini terdiri dari tugas secara sekala dan niskala. Masing-masing Desa Pakraman terlebih dahulu menetapkan awig-awig yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda sosial dan denda material berupa beras lima kilogram atau dapat diuangkan sebesar Rp 50.000.

Jurnal yang ditulis oleh (Anang Sugeng Cahyono, 2021) Fenomena mewabahnya virus covid -19 di hampir sebagian besar dunia merupakan kejadian yang tidak terprediksi dengan baik sebelumnya. Hal ini tampak dari

kegugupan negara – negara yang menjadi pandemic virus covid -19. Sekaliber US,UK,China,Jepang dan negara Eropa sampai saat ini berjibaku menanggulangi mewabahnya virus covid – 19. Segala aspek hancur dalam resesi ini.Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, kesehatan, pariwisata, industri dan masifnya dampak dengan mewabahnya virus ini menjadi bukti bahwa kemampuan pemerintah tiap negara mendapatkan ujian berat dalam menghadapinya. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020. Penanggulangan tentang semakin meluasnya virus covid 19 tidak bisa dilakukan pemerintah saja.Diperlukan kerjasama lintas disiplin dan bidang dengan mengacu pada prinsip collaborative governance. Sektor kesehatan menjadi leading yang didukung oleh ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi dan berbagai sektor lain.Diakhir artikel ini beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dengan menggunakan hasil analisis menggunakan SWOT dan Stakeholders Analisis.Dan beberapa temuan dalam naskah ini adalah penekanan atau fokus kepada program penanggulangan covid -19 yang telah dilakukan pemerintah dengan telaah strategi kolaborasi didalamnya.

Jurnal yang ditulis oleh (Maruapey, 2020) Penelitian dengan Judul Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor adalah kajian ilmiah dengan tujuan mengetahui seberapa besar pelaksanaan kebijakan berskala Mikro dapat mengatasi dan menurunkan wabah Covid 19 di

Kota Bogor. Menggunakan Metode deskriptif analisis yakni suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan angket, dengan menyertakan 250 responden yang tersebar di 6 Kecamatan Kota Bogor, guna memastikan baik tidaknya penanganan Covid 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor dikategorikan Cukup Baik dengan Skor Nilai 3,13. Artinya Kebijakan Covid 19 Berskala Mikro yang dilakukan Pemerintah Kota harus dilakukan dengan baik melalui komitmen Aparat terhadap kebijakan yang dibuat, konsistensi dalam penegakan aturan, serta dukungan masyarakat melalui disiplin terhadap protokol kesehatan, sehingga dapat mengatasi pandemi Corona ini.

Jurnal yang ditulis oleh (Nuryadin, 2020) Speech act atau tindak tutur adalah satuan lingual yang bersifat inti dalam kajian pragmatik. Tindak tutur sendiri memiliki impikatur yang berbeda dan disandarkan pada konteks yang melekat pada wacananya. Penelitian semacam ini memang telah banyak dilakukan namun pada penelitian ini peneliti mengambil sumber data yang menarik yaitu dari pesan singkat otomatis yang dikirim oleh satuan tugas penanganan COVID-19. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini hanya terfokus pada jenis-jenis tindak tutur yang terdapat pada pesan singkat layanan masyarakat terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pada penelitian ini juga penulis menggunakan teori-teori tindak tutur Searle (1979) dengan pendekatan kajian

pragmatik. Ditemukan dari 17 data yang didapat, data berupa pesan singkat dapat bagi kedalam jenis-jenis tindak tutur, yaitu; 5 data pada jenis tindak tutur direktif, 5 data pada jenis tindak tutur asertif, 1 data pada jenis tindak tutur ekspresif, 4 data pada tindak tutur komisif, dan 2 data pada jenis tindak tutur deklarasi.

Jurnal yang ditulis oleh (Tikulembang et al., 2021) Covid-19 merupakan salah satu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Gugus tugas Covid-19, harus intens menerapkan perilaku pencegahan. Tidak hanya pada saat menjalankan tugasnya, namun ketika pun selesai bertugas harus secara konsisten menerapkan tindakan pencegahan ini terutama dimasa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran perilaku yang meliputi pengetahuan dan tindakan tim satuan tugas Covid-19 tentang pencegahan Covid19 di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam diambil dari 5 informan Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Manado. Hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan dan Tindakan dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Manado. dari tingkat pengetahuan tim gugus tugas sendiri sudah mengetahui terkait cara-cara dalam menerapkan setiap protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19, juga dalam segi Tindakan dapat dilihat bahwa Tim Gugus Tugas telah berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terkait pengetahuan dan tindakan pencegahan Covid19 tim gugus

tugas telah memiliki pengetahuan dan Tindakan yang baik sesuai dengan tugas dan perannya sebagai gugus tugas yang di dalamnya mengacu pada surat edaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan tentunya menjadi suatu tolak ukur masyarakat Kota Manado terkait pencegahan covid-19 . Saran bagi tim gugus kota Manado Agar kiranya selalu tetap melakukan sosialisasi serta edukasi pada masyarakat kota Manado terkait perilaku masyarakat dalam mencegah penyebaran covid-19 di kota Manado, Saran sebaiknya masyarakat lebih lagi menaati peraturan pemerintah yang telah dibuat terkait protokol kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat dan secepatnya negara kita kembali normal.

Berikut Penjelasan dan Judul dari 10 Jurnal penelitian yang sudah dijelaskan diatas :

Tabel 1 Literatur Review

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Prasetia et al., 2020)	Efektivitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Rangka Pencegahan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kelurahan Padangsambian Kota Denpasar.	Berdasarkan pengamatan dalam meninjau efektivitas peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Kelurahan Padangsambian Kota Denpasar, peneliti menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa

			<p>efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Merujuk pada tiga unsur tersebut, dalam konteks ini terlihat bahwa masih adanya kendala pada aspek struktur hukum (struktur of law) dimana permasalahan utama yang terjadi yakni masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Tugas terkhusus terkait pengetahuan hukum dan protokol kesehatan COVID-19 sehingga menghambat operasional tugas di lapangan. Selain itu, kendala dalam aspek budaya hukum (legal culture) juga menjadi perhatian penting peneliti mengingat kepatuhan masyarakat terhadap suatu regulasi atau peraturan</p>
--	--	--	---

			<p>pemerintah terkhusus yang berkaitan dengan COVID-19 dirasa masih sangat minim. Kondisi ini juga diperkirakan sebagai respon atas berkepanjangannya wabah COVID-19 sehingga adanya desakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mengabaikan protokol kesehatan demi tetap memenuhi kebutuhan hidup.</p>
2	(Ary et al., 2020)	<p>Analisis Efektivitas Pemasangan Gerbang Disinfektan dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Desa Giling.</p>	<p>Pelaksanaan disinfeksi dalam upaya pencegahan dan penularan Covid-19 saat terjadi pandemi cukup intens baik. Berdasarkan dari cara (penyemprotan), sasaran disinfeksi (benda yang sering disentuh), dan disinfektan yang digunakan (bersifat iritatif), berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan edaran berupa rekomendasi untuk tidak menggunakan</p>

			<p>gerbang disinfeksi, karena sangat berisiko terhadap kesehatan. Perlu sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang protokol pencegahan penularan Covid-19 dan risiko kesehatan dari disinfeksi terutama dengan penyemprotan dalam gerbang disinfeksi</p>
3	(Sari, Puspita & Sholibah, Mar'atu, 2021)	Efektivitas Program Jogotonggo Dalam Upaya Pengendalian Covid-19	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program jogotonggo di Kecamatan Mojolaban terkesan terlambat karena sebelumnya telah ada satgas Covid-19. Implementasi Program Jogo Tonggo tanpa adanya sosialisasi atau pembekalan kepada pihak yang terlibat. Tidak adanya SK pembentukan Tim Jogo Tonggo dan tidak adanya perencanaan program dan anggaran serta penyediaan sumber daya (resources). Program jogotonggo tidak terlalu efektif untuk</p>

			menurunkan angka kasus Covid-19 di Kecamatan Mojolaban, namun tetap memberikan manfaat bagi pencegahan dan pengendalian Covid-19
4	(Ninla Elmawati Falabiba et al., 2021)	Kepimpinan Profetik Satgas Penanganan Covid-19 Di Kota Yogyakarta	Secara umum, Satgas Penanganan Covid-19 bisa menerapkan keempat aspek penanganan Covid-19 dengan efektif di lapangan. Keempat aspek tersebut juga sesuai dengan ketugasan Satgas antara lain data dan informasi publik, penegakkan hukum, dan penanganan kesehatan. Ketiga hal tersebut dalam pelaksanaan di lapangan membutuhkan keempat aspek kepemimpinan profetik yang saling berkaitan. Aspek kejujuran, integritas, dapat dipercaya, merupakan modal dalam menjalankan tugas Satgas Penanganan Covid-19 di lapangan. Jika salah satu aspek tidak dilaksanakan, aspek lain seperti tablig

			<p>menyebarkan informasi sulit dipercaya masyarakat. Begitu pun dengan aspek fathonah, jika tidak ada kejujuran, integritas dan dapat dipercaya, Satgas Penanganan Covid-19 bakal tidak bisa mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Jalan keluar yang dilaksanakan menjadi masalah baru di masyarakat.</p>
5	(Sumandiyar et al., 2021)	<p>Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor Terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.</p>	<p>praktik modal sosial yang dimiliki pada Satuan Tugas Covid-19 dalam penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan menggunakan pendekatan multiaktor. Pendekatan ini diharapkan memberikan solusi yang komprehensif untuk menganalisis berbagai macam bentuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan multiaktor ini dapat memberikan solusi dalam rangka percepatan</p>

			<p>pemulihan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. Dengan demikian, maka mereka yang terlibat dalam pendekatan multiaktor ini adalah pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, aparat keamanan TNI-Polri, Tokoh Lintas Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Politik, Tokoh Militer dan Kepolisian, serta organisasi yang dianggap memiliki peran dalam kemajuan sistem Pemerintahan di Indonesia.</p>
6	(Puspawati et al., 2020)	Sinergi Pemerintah Berbasis Adat Dalam Upaya Penanganan Covid-19.	<p>Upaya penanganan COVID-19 tepat dilakukan dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Bali berbasis adat. Hukum adat tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, sehingga kehadiran pecalang sebagai penegak hukum adat</p>

			berkontribusi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan desa. Penguatan fungsi pekalang ini ditegaskan oleh Keputusan Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 1571 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Satgas Gotong Royong ini selanjutnya tidak hanya menjalankan tugasnya secara sakala melainkan juga secara niskala. Keharmonisan hubungan dengan Tuhan dan lingkungan menjadi sumber pendukung dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Bali walaupun faktanya kasus terinfeksi terus mengalami peningkatan.
7	(Anang Sugeng Cahyono, 2021)	Implementasi Model Collaborative Governance Dalam	Pemerintah membentuk Tim gabungan (Satgas) yang menggunakan Model collaborative governance.

		Penyelesaian Pandemi Covid-19.	Melibatkan banyak para ahli pakar lintas sektor dalam satuan tugas agar mudah dalam melakukan penanganan covid-19
8	(Maruapey, 2020)	Model Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Berskala Mikro di Kota Bogor	Bahwa kebijakan penanganan Covid 19 berskala mikro di Kota Bogor kiranya harus terus dioptimalkan dengan menerapkan proses penegakan aturan oleh Satuan Tugas Covid 19 yang melibatkan beberapa Instansi, termasuk garda terdepan penanggulangan Covid 19 di Tingkat Kelurahan yang ada pada RT dan RW agar tegas menjalankan tugas tanpa memandang siapa orangnya, sehingga kebijakan pemerintah tentang 5T oleh setiap warga terlaksana dengan baik. Pada Tingkat Kota perlu adanya komitmen Aparat Satuan Tugas Covid 19 Kota Bogor dan Pemerintah Kota agar terus melakukan sosialisasi

			<p>kepada masyarakat pentingnya menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan setelah beraktivitas selama 20 detik di air yang mengalir dan disiplin untuk tidak berkerumun dimanapun berada. Kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil jika dukungan dan peran serta masyarakat tidak optimal. Oleh karena itu diharapkan agar disiplin dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui protap kesehatan, serta ketegasan Satuan Tugas Covid 19 adalah merupakan kunci keberhasilan penanganan dan penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Bogor.</p>
9	(Nuryadin, 2020)	Tindak Tutur Pada Pesan Singkat (SMS) Layanan Masyarakat Automatis oleh Satgas Penanganan Covid-19.	Pembahasan tentang aspek kebahasaan serta tindak tutur dianggap menarik dan unik karena peneliti pengambil data dari pesan singkat SMS layanan masyarakat terkait

			<p>pengecahan penyebaran virus COVID-19 yang didistribusikan oleh satuan tugas penanganan virus COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemui pada data-data yang dikumpulkan memiliki jenis-jenis tindak tutur yang beragam, yaitu; 5 data pada jenis tindak tutur direktif, 5 data pada jenis tindak tutur asertif, 1 data pada jenis tindak tutur ekspresif, 4 data pada tindak tutur komisif, dan 2 data pada jenis tindak tutur deklarasi. Maksud tuturan dalam setiap jenis menandakan sebuah implikatur yang terkandung dalam wacana tersebut. Hampir semua implikatur tersebut bertujuan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ditengah pandemi, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. DAFT</p>
10	(Tikulembang et al., 2021)	Gambaran Perilaku Tim Gugus Tugas	Perilaku daripada Tim Gugus Tugas Penanganan

		Terhadap Pencegahan Covid-19 Kota Manado	Covid-19 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terkait pengetahuan dan tindakan pencegahan Covid-19 tim gugus tugas telah memiliki pengetahuan dan Tindakan yang baik sesuai dengan tugas dan peran-nya sebagai gugus tugas yang di dalamnya mengacu pada surat edaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan tentunya menjadi suatu tolak ukur masyarakat Kota Manado terkait pencegahan covid-19.
--	--	--	--

Seperti yang dijelaskan diatas, Dari 10 Kajian pustaka ini yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul efektivitas satgas covid kabupaten Bantul dalam penanggulangan covid-19 tersebut. Penelitian sebelumnya Sebagian besar membahas mengenai efektivitas satgas covid-19 dalam penanggulangan covid-19. Tidak hanya itu, penelitian sebelumnya membahas mengenai Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor Terhadap Satuan Tugas Covid-19, dan efektivitas program yang dibuat oleh satgas covid-19. Penelitian sebelumnya Sebagian besar menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dari penelitian – penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya hampir Sebagian besar terkait di

desa, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang terkait penelitian di tingkat kabupaten. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian – penelitian sebelumnya.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa dasar teori yang menjelaskan efektivitas, pemerintah daerah, dan covid-19.

1.6.1. Efektivitas

1) Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris “effective” yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan sejauh mana tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi. Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu produk operasi di sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika memiliki pengaruh besar pada kemampuan untuk memberikan layanan masyarakat yang menjadi sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Gibson et.al (2013:46) Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif.

Menurut pendapat para ahli di atas dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting, karena dapat menguraikan secara garis besar keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, atau dapat dikatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, aktivasi yang telah dilakukan.

2) Faktor Efektivitas Organisasi

Menurut Denison dan Mirsha mengemukakan dalam Casida (2007). Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu :

1. Partisipasi

Merupakan cara agar anggota merasa terlibat dalam aktivitas organisasi, dan dapat menjadikan anggota bertanggung jawab atas tindakannya (Casida, 2007). Partisipasi adalah kebebasan (kemerdekaan) bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya. Selama berkaitan

dengan ide-ide yang dapat memajukan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan, maka kelompok dan pimpinan organisasi juga harus menghargai partisipasi ini. Partisipasi meliputi 3 (tiga) indikator yaitu Pemberdayaan, Orientasi Tim dan Pengembangan Kapabilitas (Casida, 2007).

2. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menjelaskan dampak lingkungannya terhadap organisasi adalah kemampuan organisasi dalam merespon perubahan lingkungan eksternal dengan melakukan perubahan internal organisasi. Denison dan Mirsha (1995) mengemukakan dalam Casida (2007) bahwa kemampuan beradaptasi dapat dilihat dari tiga (tiga) indikator yaitu perubahan (menciptakan perubahan), perhatian customer (customer attention) dan kondisi organisasi (pembelajaran organisasi).

3. Misi efektivitas organisasi

Dimensi budaya yang menunjukkan tujuan inti organisasi, tujuan ini menjadikan anggota organisasi tegas dan fokus pada apa yang dianggap penting oleh organisasi. Menurut penelitian Denison (2006), kurangnya organisasi dalam melaksanakan tugas akan mengakibatkan anggota staf gagal memahami hasil yang akan dicapai dan tujuan jangka panjang yang tidak jelas. Denison dan Mirsha (1995) mengemukakan bahwa kemampuan beradaptasi dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator, yaitu tiga indikator yaitu strategi, tujuan dan objektivitas (tujuan), visi (Penglihatan).

4. Konsistensi

Tingkat kesepakatan antar anggota organisasi tentang asumsi dasar dan nilai inti organisasi. Menekankan konsistensi keyakinan, nilai dan sistem simbol yang dipahami dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi, dan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi. Rasa keterikatan karyawan akan menunjukkan apakah terdapat konsistensi dalam organisasi. Ada nilai-nilai kunci; jelas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Konsistensi internal organisasi merupakan dimensi yang menjaga kekuatan dan stabilitas internal organisasi. Denison dan Mirsha (1995) mengemukakan bahwa konsistensi dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu nilai Organisasi, koordinasi.

Sedangkan menurut Sterss dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

1. Produktivitas

Ketika suatu organisasi mampu menghasilkan sesuatu untuk organisasi dalam jumlah yang besar dan mendatangkan hasil atau manfaat bagi organisasi. Dan juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi organisasi.

2. Kemampuan Adaptasi atau Fleksibilitas

Mampu melakukan adaptasi dengan baik. Di samping itu, mereka juga bisa bekerja secara flexibel.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan dalam bekerja menandakan bahwa organisasi sudah berhasil dan sukses dalam mencapai tujuan. Meski sudah berhasil, organisasi sebaiknya terus meningkatkan kualitas atau pun kuantitas demi mempertahankan keberhasilannya. Jangan sampai organisasi terlena dengan kata “puas” lalu tidak melakukan perubahan. Jika seperti itu, bisa-bisa nanti para kompetitor akan membuat inovasi baru yang mengancam organisasi .

4. Kemampuan ber laba

Efektivitas organisasi juga dapat diukur dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang banyak bagi organisasi. itu artinya, organisasi mampu memproduksi dan menjual barang dengan baik dan benar di tengah persaingan industri yang sangat ketat.

5. Pencarian Sumber Daya

Organisasi harus pandai mencari sumber daya yang berkualitas. Entah itu sumber daya alam untuk produksi atau pun sumber daya manusia untuk melakukan proses produksi dan penjualan. Sumber daya yang bagus akan menghasilkan produk yang berkualitas. Di mana hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk organisasi. Jadi, organisasi harus jeli dalam proses mencari sumber daya

Menurut pendapat para ahli di atas dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting, karena dapat menguraikan secara

garis besar keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, atau dapat dikatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, aktivasi yang telah dilakukan. Mengukur efektivitas suatu program atau organisasi merupakan suatu yang tidak sederhana, karena efektivitas bisa dikaji dari berbagai sudut pandang dan juga tergantung dari siapa yang mengukur atau menilai serta menginterpretasikannya. Jika dipandang dari pihak produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pengertian bahwa efektivitas adalah kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga bisa diukur dengan membandingkan antara rencana yang sebelumnya sudah ditentukan dengan hasil yang sudah diwujudkan. Akan tetapi, apabila usaha atau target yang sudah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataannya, maka program atau sesuatu yang capai tersebut tidak efektif.

3) Unsur – unsur Efektivitas

Unsur-unsur efektivitas merupakan ruang lingkup yang menjadi pembangun efektivitas itu sendiri. Menurut Cahyono (1983:54), unsur-unsur efektivitas terbagi atas 3 bagian, yaitu unsur sumber daya manusia, unsur sumber daya bukan manusia dan unsur hasil yang akan dicapai.

1. Unsur Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan. Dalam sebuah

organisasi faktor sumber daya manusia sebagai sumber penentu sukses tidaknya sebuah organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang dioperasikan sehingga efektivitas harus dapat tercapai, namun sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif, maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.

2. Unsur Sumber Daya bukan Manusia

Sumber daya bukan manusia merupakan unsur kedua dari sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau aktivitas misalnya antara lain modal, tenaga kerja, mesin, peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi.

3. Unsur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan

Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber di atas. Prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme kerja yang efektif. Efektivitas kerja dapat tercapai dengan memadukan antara kedua unsur tersebut dengan sistem manajemen yang baik, sehingga terjalin sinkronisasi antara komponen di dalamnya. Sistem manajemen kerja terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan.

4) **Tingkat Efektivitas**

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain :

1. Efektivitas Individu

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

1.6.2. Pemerintah Daerah

1) Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara

dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berikut pengertian pemerintah Daerah menurut para ahli :

Pemerintahan daerah sesuai dengan batasan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksud ialah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI. Di samping itu, penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Unsur perangkat daerah ini adalah unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja, di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Oleh sebab itu, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan gubernur dan bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pemerintahan daerah. Berdasarkan ajaran Trias Politika oleh Montesquieu, dimana kekuasaan pemerintahan yang dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Menurut Hason, dalam (Jees Sihombing, 2020) pemerintah daerah memiliki :

1. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

2. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat

penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota.
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota.
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif.

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Sedangkan, desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan

pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompokkelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.

Menurut Jayadi N.K bahwa desentralisasi mengandung pengertian: pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom; kedua, daerah otonom yang dibentuk disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “autonomos/autonomial”, yang berarti “peraturan sendiri (self-ruling). Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri).

Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi harus dipahami sebagai Independence of localities yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras atas. Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff menyatakan pula otonomi sebagai transferred power and authority over decision making to local units are the core of autonomy. Berbagai argumen tersebut tidak disanggah oleh Rosenbloom yang menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu

kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayah secara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.

1.6.3. Virus Covid-19

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.

Menurut (Susilo et al., 2020). Penyakit Coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang merebak di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Komite Partai Kota Wuhan dan Pemerintah Kota mengeluarkan pernyataan tentang "Pemberitahuan Darurat tentang Pengobatan Pneumonia yang Tidak Dapat Dijelaskan". Pada bulan Desember tahun 2019 (ECDC, 2020). Pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV) sebagai virus, Coronavirus 11 Disease (COVID-19) 2019 virus yang disebabkan oleh SARS-CoV.

Coronavirus merupakan kelompok virus patogen bagi manusia. Terdapat 7 jenis coronavirus yang diidentifikasi berasal dari reservoir hewan termasuk hewan peliharaan, kelelawar, atau tikus. Coronavirus dapat menyebabkan penyakit ringan, pernafasan akut yang parah sepertiii syndrome coronavirus (SARS-CoV), syndrome coronavirus (MERS-CoV) di Timur Tengah, dan novel SARS-CoV-2 yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang parah dan sindrom gangguan pernapasan akut, hingga menyebabkan kematian (Segars et al. 2020).

Coronavirus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2020, kasus pertama pneumonia misterius ini diduga berasal dari pasar ikan Wuhan. Tercatat pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Yang et al. 2020).

Rata-rata masa inkubasi adalah 4 hari dengan rentang waktu 2 sampai 7 hari. Masa inkubasi dengan menggunakan distribusi lognormal yaitu berkisar antara 2,4 sampai 15,5 hari. Periode bergantung pada usia dan status imunitas pasien. Rerata usia pasien adalah 47 tahun dengan rentang umur 35 sampai 58 tahun serta 0,9% adalah pasien yang lebih muda dari umur 15 tahun. Gejala umum di awal penyakit adalah demam, kelelahan atau myalgia, batuk kering. Serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan (batuk, sesak napas, sakit

tenggorokan, hemoptisis atau batuk darah, nyeri dada), gastrointestinal (diare, mual, muntah), neurologis (kebingungan dan sakit kepala). Namun tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam (83-98%), batuk (76-82%), dan sesak napas atau dyspnea (31-55%).

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Efektivitas

Efektivitas dapat dipengaruhi 4 variabel faktor, yaitu : partisipasi, adaptasi, misi efektivitas organisasi, dan konsistensi. Dan disertai oleh beberapa indikator.

1.7.2. Virus Covid-19

Virus Covid-19 adalah ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19. Virus Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin.

1.7.3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

1.8. Definisi Operasional

Menurut Denison dan Mirsha mengemukakan dalam Casida (2007).

Efektivitas dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, dan beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. Faktor-Faktor Efektivitas

Tujuan	Variabel	Indikator
Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi efektivitas satuan tugas (Satgas) covid 19 di Kabupaten Bantul dalam penanggulangan covid-19.	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan - Orientasi tim - Pengembangan kapabilitas
	Adaptasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan perubahan - Perhatian masyarakat - Kondisi organisasi
	Misi efektivitas Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Visi - Tujuan - Strategi
	Konsistensi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Inti (Nilai Organisasi) - Koodinasi

Sumber: Casida (2007)

1.9. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012).

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Menurut (Basri, 2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Penelitian ini juga menggunakan Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif-kualitatif yang mana berguna untuk memberikan pemahaman keseluruhan permasalahan satgas covid-19 kabupaten Bantul dalam penanggulangan covid-19.

Dalam Penelitian ini, penelitian ini mengambil Data dengan cara memahami tulisan-tulisan tentang bagaimana efektivitas dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan covid-19, Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan covid-19, dan Penanggulangan Covid-19.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Dalam Penelitian ini dilaksanakan di Posko Satuan Tugas (Satgas) titik pengambilan datanya yaitu di Kantor Bupati Bantul, Di Jl, Robert Wolter Monginsidi No. 1, Bantul. Alasan penulis memilih lokasi ini karena kabupaten Bantul tingkat kenaikan covid-19 yang tinggi diantara kabupaten lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, Penelitian menggunakan dua jenis data yaitu, Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Dalam Penelitian ini menggunakan Data Primer yang didapatkan dari kegiatan observasi dilokasi penelitian, dan melakukan wawancara yang lebih mendalam yang berkaitan dengan penelitian.

Data Primer ini didapatkan langsung dari informan yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini.

1) Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat

dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dengan wawancara ini agar mendapatkan bahan dalam penulisan.

Tabel 3 Data Informan

Informan	Jabatan
Sub. Bidang Komunikasi Publik, dan Perubahan Perilaku Masyarakat Koordinator.	Sekretaris Dinas Kesehatan
Sub. Bidang Penanganan Kesehatan Koordinator.	- Sekretaris BPBD Kabupaten Bantul - Sekretaris FPRB Kabupaten Bantul
Sub. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat Koordinator.	SATPOL PP Kabupaten Bantul
Satgas Kecamatan dan Desa	Satgas Kecamatan Bantul yang dikategorikan tingkat kasus covid-19 yang tinggi : 1. Satgas covid-19 Kecamatan Sewon 2. Satgas Covid-19 Desa Pendowoharjo, sewon 3. Satgas Covid-19 Kecamatan Kasihan

	4. Satgas Covid-19 Desa Bangunjiwo, kasihan
--	--

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari studi, survei, atau eksperimen yang telah dijalankan oleh orang lain atau untuk penelitian lain akan tetapi kita peregunakan dalam arti penelitian. Data ini dapat diakses dalam bentuk data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti publikasi pemerintah, sensus, catatan internal organisasi, buku, artikel jurnal, situs web dan laporan, dan lain-lain.

Menurut Husein Umar (2013), Data sekunder adalah sebagai data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram, baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

1) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009:317), dokumen adalah kumpulan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, misalnya jurnal, diary, life history, sketsa, gambar hidup, arsip, surat kabar, dan lain-lain. Dokumen berupa gambar, misalnya foto, sekte, lukisan, gambar hidup, dan sebagainya. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya

misalnya dapat berupa gambar, film, patung, karya seni, dan lain-lain.

1.10. Analisis Data

Menurut (Sugiyono,2016) Dalam Penelitian ini, analisis Data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Kualitatif, Data kualitatif sendiri diperoleh melalui data reduction dan juga display, dan data conclusion drawing/verification.

1.10.1. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. Analisis Data Kualitatif ini guna menjawab

rumusan masalah mengenai Efektivitas Satgas covid Bantul dalam penanggulangan covid-19.

1.10.2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

1.10.3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification)

Proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dalam bentuk transkrip dibaca berulang kali untuk menemukan temamema dan kategori mengenai pemberian motivasi pada Bengkel Corvette Surabaya. Langkah berikutnya adalah membuat diagram tema untuk memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengkaitkan tema-tema. Sampai pada akhir penelitian bila tidak ada lagi tema-tema baru yang muncul, maka berarti data telah jenuh diidentifikasi. Setelah tersusun kemudian membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Bagan 1. Analisis Data

